

## Kejagung Sita 354.700 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi Tol MBZ

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang 354.700 dolar Amerika Serikat (USD) terkait kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat.

Penyitaan dilakukan pada Senin (2/10), usai penyidik Direktorat Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menggeledah tiga lokasi dalam perkara tersebut.

"Tim Penyidik juga melakukan penyitaan atas mata uang senilai 354.700 Dollar AS yang diduga sebagai uang hasil tindak pidana," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (3/10).

Tiga tempat yang digeledah berlokasi di DKI Jakarta. Pertama, PT GSF, beralamat di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedua, PT DP terletak di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur; dan PT RUA beralamat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Selain uang dalam bentuk dolar, penyidik juga

menemukan bukti lain termasuk dokumen-dokumen. "Dan bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana," ujarnya.

Penyitaan dilakukan berkaitan dengan empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, yaitu Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasmarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC. Kemudian, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC; dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas (SB).

"Penyitaan dan penggeledahan dilaksanakan atas nama tersangka DD, tersangka YM, tersangka TBS dan tersangka SB," tuturnya.

Sebagai informasi, total ada lima tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara korupsi ini. Satu tersangka lain adalah Ibnu Noval (IBN), mantan Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya. Ibnu merupakan tersangka obstruction of justice atau perintang penyidikan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi sebelumnya mengatakan, nilai kerugian sementara kasus korupsi Tol MBZ Jakarta-Cikampek II ini ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun. ● han

## Panglima dan Seluruh Kepala Staf Hadiri Gladi Bersih HUT Ke-78 TNI

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri gladi bersih HUT ke-78 TNI yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Panglima TNI datang didampingi seluruh kepala staf angkatan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dandung Abdurachman duduk di sebelah kiri Yudo Margono.

Sementara di sebelah kanan ada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali duduk di samping Fadjar.

Kompak mengenakan seragam loreng dan kaca mata hitam, mereka fokus menyaksikan gladi bersih

Parade dan Defile HUT Ke-78 TNI Tahun 2023.

Sebagai informasi, Upacara Parade dan Defile HUT ke-78 TNI Tahun 2023 mengerahkan sebanyak 4.630 personel pasukan dan 130 Alutsista.

Adapun tema HUT kepala TNI yaitu 'TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju' yang bermakna bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri tiga matra akan selalu solid, kokoh dan loyal kepada Bangsa dan Negara.

Tidak hanya itu, TNI juga akan terus mengawal demokrasi bersinergi dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. ● mei



IDN/ANTARA

## SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI BTS 4G BAKTI KOMINFO

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G Plate (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/10). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari tujuh saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk dalam Prolegnas 2023

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M Nurdin mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

"Memasukkan satu RUU baru dalam prolegnas perubahan kedua RUU prioritas tahun 2023 yaitu RUU tentang Daerah Khusus Jakarta," ucap Nurdin.

Sebelumnya dalam Prolegnas 2020-2024 sudah tercantum RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, RUU tersebut saat ini diganti dengan RUU tentang DKJ lantaran RUU Ibu Kota Negara sudah disahkan.

"Karena ada UU IKN yang baru," ucapnya.

RUU tentang DKJ pertama kali diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia menyatakan, Jakarta bakal berstatus daerah khusus karena mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis karena status sebagai bekas ibu kota dan potensi yang dimilikinya.

Ma'ruf juga menyebutkan RUU DKJ akan mengatur pembentukan Dewan Regional yang meliputi Jakarta dan daerah di sekitarnya, seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## PARIPURNA DPR SAHKAN CALON HAKIM KONSTITUSI

Calon Hakim Konstitusi Arsul Sani mengikuti rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10). DPR mengesahkan anggota DPR fraksi PPP, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki usia pensiun.

# Jokowi Bertemu SBY Dinilai Momentum Terbebas dari Bayang-bayang Megawati

Di tengah merebaknya isu bakal ada perombakan kabinet Pemerintahan Jokowi, Partai Demokrat disebut bakal dapat jatah kursi menteri.

JAKARTA (IM) - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai sinyal bahwa partai berlabang mercy ini akan

mendapat jatah kursi menteri.

Jika spekulasi itu benar-benar terjadi, Jokowi dianggap tengah berupaya membebaskan diri dari bayang-bayang tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang memiliki

hubungan kurang harmonis dengan SBY.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoiril Umam kepada wartawan,

Senin (2/10) malam.

Pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.

Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menujurnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernang bagi Demokrat.

"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi," kata Umam.

Merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.

Di sisi lain, Umam menambahkan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bang-

sa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.

"Atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu," pungkas Umam.

Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) sore. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam lamanya. Pertemuan ini memicu spekulasi bahwa Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri di tengah santernya isu perombakan komposisi menteri.

Meski demikian, Demokrat enggan berandai-andai mengenai kemungkinan masuk dalam kabinet pemerintahan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky, Senin (2/10). ● han

## DPR Sahkan RUU ASN Jadi UU

JAKARTA (IM) - Rapat Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (3/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju agar RUU ASN dapat disahkan menjadi UU. Hanya saja, Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan RUU tersebut disahkan menjadi UU.

"Selanjutnya kami tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco kepada peserta rapat.

"Setuju," setu peserta rapat.

Untuk meyakinkan keputusan, Dasco melempar pertanyaan persetujuan kembali kepada peserta rapat. Dengan kompak, anggota legisla-

tor menyepakati RUU ASN disahkan menjadi UU.

"Selanjutnya kami akan tanyakan sekali lagi kepada anggota apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco.

"Setujuuu....," seru peserta rapat serentak.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di dalam rapat paripurna.

Kesepakatan, diambil dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menpan-RB, Menkeu, Mendagri, dan Menkumham pada Selasa (26/9) lalu.

Sebelum persetujuan tersebut, masing-masing fraksi dan pemerintah juga melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan pendapatnya hingga akhirnya menyetujui RUU tersebut dibawa dalam

pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

"Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah. Ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui. Jadi kita sahkan saja Rancangan Undang-Undang ini?," tanya Doli di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9) lalu.

"Setuju," seru peserta rapat.

Sementara itu, Menpan-RB Azwar Anas mengatakan, RUU itu hadir guna menjawab tantangan dan ekspektasi publik terhadap pelayanan birokrasi. Dengan adanya RUU itu, ia menilai, birokrasi akan bergerak dinamis dan profesional.

"RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa," kata Azwar. ● han



IDN/ANTARA

## TNI AL LUNCURKAN KAPAL HARBOUR TUG GUNUNG RANAI

Pekerja mengamati kapal Harbour Tug H-405 saat Shipnaming dan Peresmian di Galangan Kapal Noahtu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/10). Kapal Harbour Tug atau kapal tunda diresmikan TNI AL merupakan produksi kapal dalam negeri yang diberi nama Gunung Ranai dirancang untuk memberikan pelayanan pemanduan dan penundaan dalam membantu pergerakan manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) keluar masuk pelabuhan.

**PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL (REKSA DANA) dengan rincian sebagai berikut :

- REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP SYARIAH 1 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dan OJK sesuai dengan Surat nomor : S-2114/PM.02/2023 tanggal 25 Juli 2023

Penawaran Umum atas Unit Penyetaraan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP SYARIAH 1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyetaraan.

Setiap Unit Penyetaraan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP SYARIAH 1 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyetaraan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyetaraan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

**SYAILENDRA**

Jakarta, 4 Oktober 2023

Manajer Investasi  
PT SYAILENDRA CAPITAL  
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900  
Faksimili : (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENGEREMIKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN".

**PENGUMUMAN**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Para Pemegang Saham dan Pengurus PT XYGINDO BERKAH LANGIT NUSANTARA berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Perseroan) mengumumkan bahwa Perseroan berencana melakukan pengalihan saham-saham dalam Perseroan yang mana akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan dan juga perubahan klasifikasi saham-saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap Pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseroan pada alamat domisili Perseroan yakni Sahid Sudirman Centre lantai 49 Unit E, Jalan Sudirman Nomor 86, Kelurahan Karet Tenggis, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Pengumuman ini.

Jakarta, 4 Oktober 2023  
Tertanda  
Para Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan